

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMAKASIH	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Struktur Organisasi Skripsi	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	14
2.1 Mediasi Dalam Konflik	16
2.1.1 Tujuan dan Manfaat Mediasi	22
2.2 Teori Konflik	24
2.3 Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Metode Penelitian.....	33
3.1.1 Heuristik.....	33
3.1.2 Kritik	34
3.1.2.1 Kritik Eksternal	35
3.1.2.2 Kritik Internal	35
3.1.3 Historiografi	35
3.2 Persiapan Penelitian	36
3.2.1 Penentuan dan Pengajuan Tema Penelitian	36

Eka Auliana Pratiwi, 2019

*CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA
GERAKAN ACEH MERDEKA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA 2005-2012*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3.2.2	Penyusunan Rancangan Penelitian	38
3.2.3	Proses Bimbingan	39
3.3	Pelaksanaan Penelitian	40
3.3.1	Heuristik	40
3.3.2	Kritik	43
3.3.2.1	Kritik Eksternal	43
3.3.2.2	Kritik Internal	44
3.3.3	Historiografi	47
BAB IV Peranan <i>Crisis Management Initiative</i> dalam		
Penyelesaian Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan		
Pemerintah Indonesia 2005-2012.....		
4.1	Pengaruh GAM terhadap konflik Aceh	51
4.1.1	Periode Daud Beureuh dan Deklarasi DI/TII	52
4.1.2	Hasan Tiro dan Pembentukan GAM	58
4.1.2.1	Pola Perjuangan GAM	62
4.1.3	Respon Pemerintah RI Terhadap GAM	66
4.1.3.1	Pendekatan Militer dan Politik	66
4.1.3.2	Pendekatan Dialogal (Negosiasi)	71
4.2	Latar belakang CMI Sebagai Mediator	74
4.2.1	Urgensi Mediator Sebagai Pihak Ketiga dalam Penyelesaian Konflik	74
4.2.2	Pertimbangan Pemilihan CMI sebagai Mediator	77
4.2.3	CMI Menggandeng Uni Eropa	79
4.3	Proses Perdamaian oleh CMI	80
4.4	Dampak Perjanjian Damai Pasca MoU Helsinki	85
4.4.1	Evaluasi Perdamaian di Aceh oleh CMI	88
4.4.2	Tujuan Evaluasi Pelaksanaan MoU Helsinki	89
4.4.3	Kegiatan dan Pencapaian	92

4.4.4 Perbedaan Pelaksanaan Hasil MoU di Aceh	94
4.4.5 Peraturan UUPA yang belum Terlaksana berdasarkan Ketentuan MoU	95
4.4.5.1. Pelabuhan Laut dan Bandar Udara	95
4.4.5.2. Auditor Independen	96
4.4.5.3. Pengadilan Hak Asasi Manusia	96
4.4.5.4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi18.....	97
4.4.6 Ketentuan MoU yang Tidak Termasuk dalam UUPA.	98
4.4.6.1 Reintegrasi kedalam Masyarakat	98
4.4.6.2 Pengaturan Keamanan	101
4.4.7 Faktor Pendukung Keberlangsungan Perdamaian di Aceh	102
4.4.7.1 Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Proses Perdamaian	102
4.4.7.2 Pembangunan Ekonomi bagi Kesejahteraan .	109
4.4.7.3 Situasi Keamanan di Aceh	105
4.4.8 Kesimpulan dan Saran Bagi Keberlangsungan Perdamaian di Aceh	107
4.4.8.1 Untuk Proses Dialog antara Para Pihak dan Implementasi MoU	107
4.4.8.2 Mengenai Peran Masyarakat Sipil	118
4.4.8.3 Mengenai Masalah Keamanan	118
4.4.9 Bagan Penyelesaian Konflik Aceh oleh CMI	110
4.5. Analisis Konflik Aceh Berdasarkan Teori Konflik Dahrendorf dan Galtung	114
4.5.1 Teori Konflik Dahrendorf	114
4.5.2 Teori Konflik Galtung	116
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI	117
5.1 Simpulan	117
5.2 Rekomendasi	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Prinsip Perundingan antara CoHA dan Helsinki	79
Tabel 4.2 Permasalahan dalam Pelaksanaan UUPA di Aceh	113

Eka Auliana Pratiwi, 2019

*CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA
GERAKAN ACEH MERDEKA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA 2005-2012*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Delegasi dari GAM dan Pemerintah Indonesia beserta Ketua CMI Pasca Penandatanganan MoU Helsinki	88
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Naskah MoU Helsinki
- Lampiran 2. Tabel Perbedaan Pelaksanaan Hasil MoU di Aceh
- Lampiran 3. Martti Ahtisaari sebagai Ketua CMI, Finlandia (atas) dan Hasan Tiro, Sang Pemikir Ideologi GAM (bawah)
- Lampiran 4. Dokumentasi Pasca Penandatanganan MoU Helsinki oleh delegasi dari Indonesia yaitu Hamid Awaluddin (kiri) dan delegasi dari GAM yaitu Malik Mahmud (kanan)
- Lampiran 5. Kunjungan Martti Ahtisaari (kiri) didampingi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (kanan) memberikan penjelasan usai pertemuan tertutup di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, (10/12/2009).